

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas dan infrastruktur pendidikan berperan penting dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Seperti yang dijelaskan dalam Bab VII Pasal 42 dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dijelaskan secara rinci bahwa sekolah harus memiliki fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Sarana tersebut adalah buku-buku sumber pembelajaran, media pembelajaran, peralatan praktik pembelajaran, dan lain-lain. Setiap sekolah diharuskan memiliki fasilitas pendidikan yang representatif, termasuk lahan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang bimbingan dan konseling, ruang UKS, ruang OSIS, ruang Pramuka, ruang PMR, taman, fasilitas olahraga, kantin sekolah, dan lain-lain. Hal ini penting agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, terus-menerus, dan berkesinambungan, sehingga berdampak positif pada mutu pendidikan di sekolah. Untuk menyediakan sarana dan prasarana tentu tidaklah mudah, perlu kerja keras, strategi pembiayaan yang mantap, pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai tentulah akan berdampak pada layanan pendidikan minimal di SMA Negeri 13 Samarinda Kalimantan Timur.

Sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu bagi generasi penerus bangsa dimana hal tersebut diatur dalam perundang-undangan dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta tokoh masyarakat sekitar bersama-sama mewujudkan ketersediannya dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang merupakan hak normatif siswa. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana untuk perbaikan atau pembangunan fisik fasilitas pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2004, dengan berbekal Surat Keputusan Walikota Samarinda berdirilah SMA Negeri 13 Olah Raga Samarinda, semenjak berdiri, Kepala SMA

Negeri 13 Samarinda, sudah dihadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik, mulai dari tenaga guru baru 4 orang yang Pegawai Negeri, sisanya tenaga honor, tenaga Tata Usaha baru 2 orang, sarana dan prasarana belum ada, masih menumpang di SMA Negeri 9 Samarinda mengharuskan Kepala Sekolah berpikir keras untuk mewujudkan SMA Negeri 13 Samarinda seperti yang dicita-citakan Walikota Samarinda yaitu Mewujudkan sekolah Olah raga prestasi yang membanggakan Kalimantan Timur. Kepala Sekolah dengan dukungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mencari lahan yang strategis untuk keperluan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan juga untuk berlatih bagi siswa atlit prestasi. Biasanya siswa atlit setelah selesai proses pembelajaran mereka kembali ke barak latihan di Cabang Olahraga masing-masing, maka pemilihan lokasi strategis sekolah sangat penting agar siswa atlit tidak terlalu jauh antara sekolah dan tempat latihan. Pada kondisi ini, campur tangan Walikota Samarinda sangat diperlukan agar SMA Negeri 13 Samarinda dengan segala fasilitas sarana dan prasaranya segera terwujud. Pada tahun 2006, praktis setelah 2 tahun berdiri Pemerintah Kota Samarinda membangun Unit Sekolah Baru (USB) dengan segala fasilitasnya, yang akan digunakan oleh SMA Negeri 13 Samarinda. Berdiri di atas lahan 11 hektar milik Pemerintah Kota Samarinda, akhirnya terwujud. Masalah muncul ketika gedung akan digunakan. Lokasi sekolah sangat jauh dari tempat latihan para siswa atlit, jaraknya 10 km dari tempat latihan, di samping itu areal sekolah dikelilingi dua kuburan, yaitu kuburan pribumi dan kuburan China menambah ketidaksesuaian dari aspek penggunaannya untuk kegiatan belajar mengajar, latihan atlit prestasi dan kenyamanan kegiatan. Pada awal tahun 2007, siswa atlit diminta untuk menempati gedung baru, namun mereka tidak bersedia, karena menurut mereka tidak masuk akal kalau sekolah dikelilingi oleh kuburan, dan juga sangat jauh dari tempat latihan. Jika mereka dipaksa untuk pindah maka mereka memutuskan untuk tidak sekolah, mereka lebih baik fokus pada latihan olahraga prestasi demi mempersiapkan PON ke VIII tahun 2008 waktu itu. Maka Kepala SMA Negeri 13 Samarinda memutuskan untuk menumpang di gedung SMP PGRI di jalan K.H. Damanhuri Samarinda. Masalah bertambah ketika gedung ditempati, yaitu tidak ada fasilitas yang mendukung, yang tersedia hanya ruang kelas, itupun hanya 3 ruang, tanpa listrik, air pdam, meja kursi, papan tulis, toilet. Sementara pada waktu itu sekolah tidak memiliki dana, Pemerintah kota Samarinda hanya memberikan dana rutin yang hanya cukup untuk operasional

dan honor guru. Sementara dana Bos dan Bosda belum ada. Sementara Komite Sekolah sebagai sumber daya masyarakat belum berkontribusi terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Pada tahun 2012, SMA Negeri 13 Samarinda memperoleh lahan sekolah seluas 3,1 Hektar dari 10,5 Hektar lahan Pemerintah Kota di Jalan DI Panjaitan. Lahan yang diberikan masih berupa lahan kosong sehingga perlu pembiayaan yang besar untuk menempati lahan tersebut. Akhirnya pada tahun 2015 Kepala sekolah memutuskan untuk pindah ke jalan DI Panjaitan. Untuk sementara menempati gedung milik SMK Negeri 7 Samarinda sebanyak 10 ruang, sampai SMA Negeri 13 Samarinda memiliki gedung yang representative. Berdasarkan data di lapangan bahwa gedung yang belum dilengkapi fasilitas apapun, maka diperlukan strategi pembiayaan berkaitan dengan pembangunan gedung, fasilitas listrik dan air pdam, dan juga biaya operasional sekolah.

Kepala sekolah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di sebuah sekolah dan memegang peran penting dalam semua aspek kehidupan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penting bagi kepala sekolah dan para guru untuk menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik. Proses pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan arahan yang diberikan oleh kepala Sekolah (Minsih, Rusnilawati, & Mujahid, 2019). Dalam kepemimpinannya, seorang kepala sekolah memerlukan banyak pengetahuan dan ketrampilan konseptual yang luas. Kemampuan ini digunakan untuk memahami organisasi secara keseluruhan dan untuk mengarahkan pembangunan secara menyeluruh (Wening & Santosa, 2020). Maka diperlukan strategi pembiayaan oleh Kepala Sekolah mulai dari rencana pembiayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, terutama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus betul-betul direncanakan dengan baik, terutama terkait dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Pemimpin harus memiliki beragam kemampuan, termasuk dalam bidang administrasi sekolah, komunikasi yang efektif, komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, serta memiliki daya tarik atau kharisma yang mampu menginspirasi orang lain. Mereka juga harus berfokus pada kemajuan sekolah. Di era globalisasi yang kompetitif seperti saat ini, baik institusi pendidikan maupun non-pendidikan perlu memiliki manajemen yang efisien untuk mencapai kesuksesan (Siregar, Lubis, & Darwin, 2022). Untuk pembangunan fasilitas gedung sekolah tentu bertahap, dimulai pada tahun 2017 dibangun 2 unit Ruang Kelas baru dimana anggaran

pembangunannya berasal dari Banper Direktorat Pembinaan SMA, dilanjutkan tahun 2018 dibangun lagi 2 unit Ruang Kelas Baru dan 1 unit perpustakaan yang anggarannya berasal dari Banper Direktorat Pembinaan SMA.

Pembiayaan pendidikan adalah pandangan yang mencakup aspek global, umum, dan menyeluruh dalam mewujudkan berbagai regulasi, aturan, dan program terkait tata kelola keuangan, anggaran pendidikan, serta sumber daya pendidikan lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Dalam konteks pembiayaan ini, dana pendidikan merupakan sumber daya yang terbatas, oleh karena itu, perlu dikelola secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, peneliti dihadapkan pada satuan pendidikan yang sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, gedung sekolah sebagian besar masih menumpang di sekolah lain, sementara gedung yang sudah dimiliki baru 6 unit ruang kelas, 1 unit perpustakaan, 1 unit laboratorium bahasa dan selebihnya masih menumpang dan sementara. Dalam kondisi seperti ini mengharuskan Kepala Sekolah betul-betul memiliki strategi dan penuh upaya untuk membangun prasarana yang memadai dan juga tetap mengedepankan terpenuhinya biaya operasional sekolah, sehingga 8 standar nasional pendidikan sedikit demi sedikit dapat diwujudkan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu kepala sekolah untuk menggali potensi pembiayaan sarana dan prasarana, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, CSR dari beberapa perusahaan di Kalimantan Timur dan juga dari sumber daya masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah.

B. Identifikasi Masalah

1. Sejak sekolah berdiri sampai saat ini, sarana dan prasarana sekolah sangat tidak memadai, sebagian besar fasilitas yang ada masih menumpang di sekolah lain, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif.
2. Pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan selama ini belum efektif, sehingga menghambat proses layanan pendidikan
3. Saat ini jumlah kelas yang dimiliki 6 unit kelas baru, 1 unit perpustakaan dan 1 unit laboratorium bahasa, fasilitas selebihnya menumpang, hal ini berakibat pada kegiatan belajar yang kurang optimal.

4. Jumlah komputer yang dimiliki saat ini sebanyak 45 unit, sementara siswa kelas XII yang akan mengikuti ujian Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) berjumlah 229 siswa, sehingga pelaksanaannya harus bergantian sampai 3, 4 tahap, hal ini berakibat molornya pelaksanaan ujian.
5. Dari jumlah guru sebanyak 45 orang, 25 orang diantaranya guru honorer, tentu hal ini berakibat pada bertambahnya beban anggaran pendidikan yang berasal dari dana bosda dan bosnas.
6. Terdapat 5 orang guru yang berlatar belakang non kependidikan, kondisi ini tentu merepotkan, karena sekolah beberapa kali harus mengikutkan mereka pada pelatihan pedagogik.
7. Saat ini lahan seluas 3,1 Ha yang diperuntukkan untuk pengembangan SMA Negeri 13 Samarinda sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda, belum diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sangat menyulitkan dalam proses pembangunannya, karena pada praktiknya ada lintas sektoral dan ada ego sektoral antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Samarinda.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini hanya akan fokus pada permasalahan pembiayaan sarana dan prasarana yang selama ini belum efektif terutama terkait dengan gedung-gedung sekolah, kantor, sarana ibadah dan media pembelajaran sehingga perlu diungkap bagaimana strategi pembiayaan sarana dan prasarana yang tepat guna meningkatkan efektifitas.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menggali sumber pembiayaan sarana dan prasarana dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan penguatan kerjasama kemitraan sumber daya masyarakat/ komite sekolah, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan minimal di SMA Negeri 13 Samarinda.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap strategi pembiayaan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam mencari sumber anggaran sarana dan prasarana dalam meningkatkan layanan pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda
2. Untuk mengungkap strategi Pembiayaan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam mengorganisasikan dan menggerakkan anggaran sarana dan prasarana dalam meningkatkan layanan pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda
3. Untuk mengungkap strategi pembiayaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh kepala sekolah dalam penguatan kerjasama kemitraan dalam meningkatkan layanan pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademis dan menambah wawasan keilmuan tentang strategi pembiayaan sarana dan prasarana di semua sekolah. Strategi pembiayaan sarana dan prasarana tidak akan pernah habis untuk diteliti, karena bersifat dinamis dan berkembang, dan hampir semua masalah pembiayaan dialami oleh institusi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi pembiayaan sarana dan prasarana sangat menarik untuk diteliti, karena akan menjadi solusi ketika sekolah mengalami masalah pembiayaan, menutupi kekurangan biaya operasional sekolah dan lain sebagainya. Dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah sehingga masalah pembiayaan untuk operasional sekolah dapat teratasi. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks yang terkait dengan strategi yang digunakan kepala sekolah dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan penguatan kerjasama kemitraan sumber daya masyarakat/ komite sekolah, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan minimal di sekolah.
2. Manfaat akademis, sumbangan pemikiran baru berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana di sekolah dan terbuka untuk tindak lanjut penelitian yang lebih luas dan komprehensif.

3. Manfaat langsung di dalam pengambilan keputusan tentang strategi pembiayaan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda.